

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 25861/Ses.1/09/2024

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Agustus Tahun 2024
Tanggal : 19 September 2024

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode bulan Agustus tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan Agustus 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp127.078.350.892 (51,91%).
2. Pada capaian kinerja fisik, LKPP memiliki 4 Indikator Sasaran Strategis (rata-rata capaian 75,14%), 14 Indikator Sasaran Program (rata-rata capaian 84,60%), 61 Indikator Sasaran Kegiatan (rata-rata capaian 81,00%), 70 Rincian Output (rata-rata capaian 69,55%), dan 187 Komponen (rata-rata capaian 62,37%).
3. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target, yaitu:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
 - b. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya
 - c. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing
 - d. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
 - e. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
 - f. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
 - g. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS
 - h. Indikator Rincian Output - SDM JF PPBJ
 - i. Indikator Rincian Output - UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3
4. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Merencanakan dan mengupayakan percepatan kegiatan serta proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran pada akhir triwulan III sebesar $\geq 71,2\%$ dapat tercapai;
 - c. Meningkatkan pencapaian kinerja fisik baik pada indikator capaiannya rendah maupun yang masih belum berprogres;
 - d. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen);
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Agustus 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Setio Widodo

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>



LAPORAN

Monitoring & Evaluasi Kinerja Unit Organisasi

Periode Bulan Agustus

TAHUN
20
24

Biro Perencanaan dan Keuangan

Gedung LKPP Lt.9

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta



www.lkpp.go.id



lkpp_ri



Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah



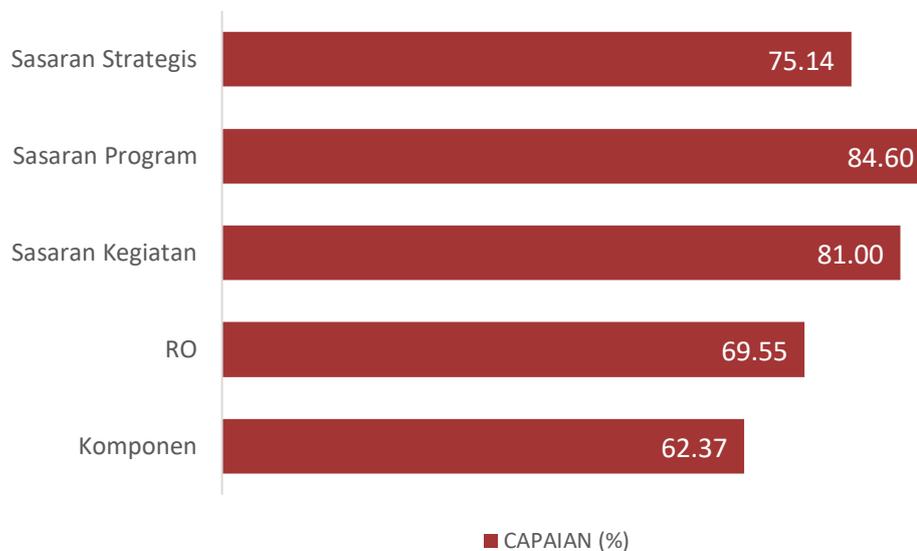
021-29935577
144

SUMMARY

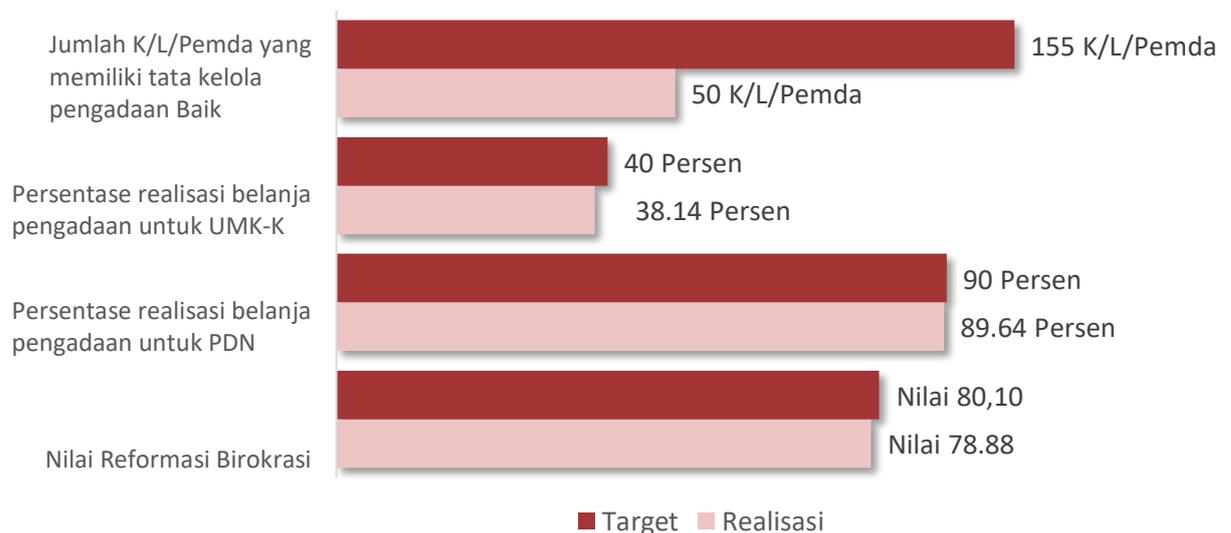
CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Capaian Fisik



Sasaran Strategis



SUMMARY

Penyerapan Anggaran

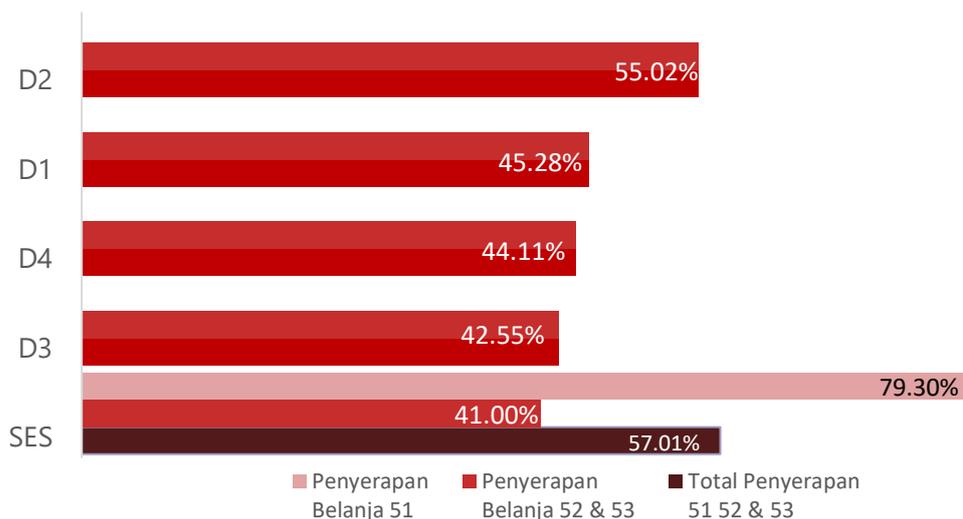


Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

Per tanggal 31 Agustus 2024



Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Organisasi Eselon I TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

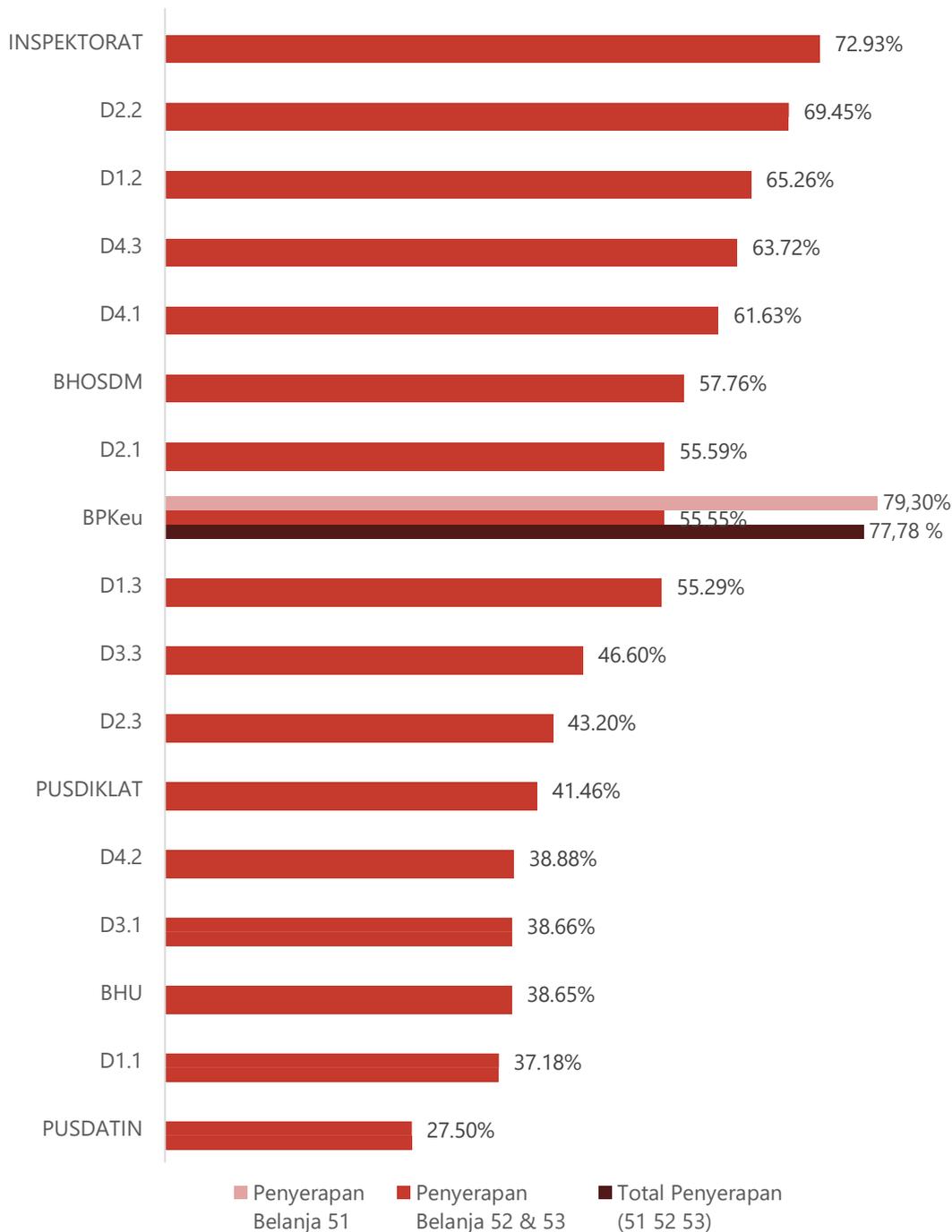


*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 31 Agustus 2024

Sampai dengan 31 Agustus 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran pada Unit Organisasi Eselon I, didapatkan persentase realisasi penyerapan dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 **terbesar** terdapat pada Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital sebesar Rp19,989,994,684 (55,02%) dan **terkecil** terdapat pada Sekretariat Utama Rp7.665.216.284 (41%).



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 31 Agustus 2024

Sampai dengan 31 Agustus 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran pada Unit Organisasi Eselon II, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 **terbesar** terdapat pada Inspektorat sebesar Rp729,252,818 (72,93%) dan **terkecil** terdapat pada Pusat Data dan Informasi sebesar Rp3,136,458,890 (27,50%).

Perbandingan Rencana Penarikan Dana (RPD) Dengan Realisasi Anggaran

No.	Unit Organisasi	RPD Agustus (Rp)	Realisasi Anggaran Agustus (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5 / 3)
1	BHOSDM	Rp409.508.549	Rp529.334.498	Rp119.825.949	29,26%
2	BHU	Rp6.157.729.305	Rp3.326.957.145	-Rp2.830.772.160	-45,97%
3	BPKEU	Rp387.909.936	Rp423.718.568	Rp35.808.632	9,23%
4	BPKEU (Belanja Pegawai)	Rp4.629.353.909	Rp4.617.260.000	-Rp12.093.909	-0,26%
5	D1.1	Rp2.284.314.329	Rp1.074.826.233	-Rp1.209.488.096	-52,95%
6	D1.2	Rp153.114.438	Rp278.798.400	Rp125.683.962	82,08%
7	D1.3	Rp1.305.075.648	Rp906.218.424	-Rp398.857.224	-30,56%
8	D2.1	Rp976.196.542	Rp294.806.178	-Rp681.390.364	-69,80%
9	D2.2	Rp1.193.501.912	Rp1.670.125.007	Rp476.623.095	39,93%
10	D2.3	Rp970.888.707	Rp853.903.161	-Rp116.985.546	-12,05%
11	D3.1	Rp234.714.892	Rp176.838.550	-Rp57.876.342	-24,66%
12	D3.3	Rp377.858.390	Rp240.060.910	-Rp137.797.480	-36,47%
13	D4.1	Rp8.810.000	Rp406.336.593	Rp397.526.593	4.512,22%
14	D4.2	Rp1.420.181.000	Rp2.133.851.380	Rp713.670.380	50,25%
15	D4.3	Rp169.270.250	Rp379.325.100	Rp210.054.850	124,09%
16	Inspektorat	Rp130.563.413	Rp117.730.179	-Rp12.833.234	-9,83%
17	PUSDATIN	Rp751.265.000	Rp841.390.313	Rp90.125.313	12,00%
18	PPSDM PBJ	Rp416.912.100	Rp107.865.034	-Rp309.047.066	-74,13%
TOTAL LKPP		Rp21.977.168.320	Rp18.379.345.673	-Rp3.597.822.647	-16,37%

Catatan:

- * 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar $\pm 5\%$ untuk nilai maksimum IKPA LKPP;
 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.
 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD
 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD
 5. RPD (3) dan Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan merupakan RPD dan penyerapan anggaran parsial bulan Agustus tahun 2024

■ Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$

■ Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	6
BAB I	10
MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA	10
1.1 ANGGARAN	10
1.1.1 Pagu Anggaran	10
1.1.2 Penyerapan Anggaran.....	11
1.2 PELAPORAN EKSTERNAL	12
1.3.1 Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan.....	12
1.3.2 Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS	13
BAB II	15
MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI	15
2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)	15
A. Capaian Kinerja Fisik	15
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	16
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	16
D. Rekomendasi.....	16
2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)	17
A. Capaian Kinerja Fisik	17
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	18
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	18
D. Rekomendasi.....	19
1.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)	19
A. Capaian Kinerja Fisik	19
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	20
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	20
D. Rekomendasi.....	21
1.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)	21
A. Capaian Kinerja Fisik	21
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	22
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	23
D. Rekomendasi.....	23

1.5	DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)	24
	A. Capaian Kinerja Fisik	24
	B. Capaian Kinerja Anggaran.....	24
	C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	25
	D. Rekomendasi.....	25
1.6	DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)	26
	A. Capaian Kinerja Fisik	26
	B. Capaian Kinerja Anggaran.....	27
	C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	27
	D. Rekomendasi.....	27
1.7	DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)	28
	A. Capaian Kinerja Fisik	28
	B. Capaian Kinerja Anggaran.....	29
	C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	29
	D. Rekomendasi.....	30
1.8	DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)	31
	A. Capaian Kinerja Fisik	31
	B. Capaian Kinerja Anggaran.....	32
	C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	32
	D. Rekomendasi.....	32
1.9	DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)	33
	A. Capaian Kinerja Fisik	33
	A. Capaian Kinerja Anggaran.....	34
	B. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	34
	C. Rekomendasi.....	35
1.10	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)	36
	A. Capaian Kinerja Fisik	36
	B. Capaian Kinerja Anggaran.....	37
	C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	38
	D. Rekomendasi.....	38
1.11	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)	39
	A. Capaian Kinerja Fisik	39
	B. Capaian Kinerja Anggaran.....	39

C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	40
D.	Rekomendasi.....	40
1.12	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1).....	41
A.	Capaian Kinerja Fisik	41
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	42
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	42
D.	Rekomendasi.....	42
1.13	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2).....	43
A.	Capaian Kinerja Fisik	43
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	44
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	44
D.	Rekomendasi.....	45
1.14	DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3).....	46
A.	Capaian Kinerja Fisik	46
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	47
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	48
D.	Rekomendasi.....	48
1.15	INSPEKTORAT.....	48
A.	Capaian Kinerja Fisik	48
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	49
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	49
D.	Rekomendasi.....	50
1.16	PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	50
A.	Capaian Kinerja Fisik	50
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	51
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	51
D.	Rekomendasi.....	52
1.17	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN).....	52
A.	Capaian Kinerja Fisik	52
B.	Capaian Kinerja Anggaran.....	53
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	53
D.	Rekomendasi.....	54
BAB III	55
KESIMPULAN	55
A.	Kesimpulan	55

BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

1.1.1 Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor: SP DIPA-DIPA-106.01-0/2024 tanggal 24 Januari 2024, pagu anggaran LKPP Tahun 2024 sebesar Rp244.786.416.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	21.98%
52 Belanja Barang	166.738.377.000	68.12%
53 Belanja Modal	24.249.460.000	9.91%
TOTAL	244.786.416.000	100.00%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	53.798.579.000	55.500.411.000	19.426.512.000	74.926.923.000
BHOSDM	-	5.941.861.000	15.000.000	5.956.861.000
BPKeu	-	3.683.337.000	-	3.683.337.000
BHU	-	45.875.213.000	19.411.512.000	65.286.725.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	53.798.579.000	-	-	53.798.579.000
Kedeputian 1 (D1)	-	31.625.133.000	-	31.625.133.000
D1.1	-	18.754.375.000	-	18.754.375.000
D1.2	-	2.318.730.000	-	2.318.730.000
D1.3	-	10.552.028.000	-	10.552.028.000
Kedeputian 2 (D2)	-	36.079.499.000	253.800.000	36.333.299.000
D2.1	-	3.073.689.000	157.800.000	3.073.689.000
D2.2	-	14.831.835.000	-	14.831.835.000
D2.3	-	18.173.975.000	96.000.000	18.269.975.000
Kedeputian 3 (D3)	-	7.789.260.000	-	7.789.260.000
D3.1	-	3.969.791.000	-	3.969.791.000
D3.3	-	3.819.469.000	-	3.819.469.000
Kedeputian 4 (D4)	-	23.994.341.000	-	23.994.341.000
D4.1	-	3.229.245.000	-	3.229.245.000
D4.2	-	18.663.984.000	-	18.663.984.000
D4.3	-	2.101.112.000	-	2.101.112.000
INSPEKTORAT	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
PUSLAT	-	3.444.686.000	467.208.000	3.911.894.000
PUSDATIN	-	7.305.047.000	4.101.940.000	11.406.987.000
TOTAL	53.798.579.000	Rp166.738.377.000	Rp24.249.460.000	244.786.416.000

1.1.2 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Agustus 2024 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar Rp 127.078.350.892 atau sebesar 51,91%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	42.664.656.640	79,30%	11.133.922.360
52 Belanja Barang	166.738.377.000	83.104.947.161	49,84%	83.633.429.839
53 Belanja Modal	24.249.460.000	1.308.747.091	5,40%	22.940.712.909
Total	244.786.416.000	127.078.350.892	51,91%	117.708.065.108

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
SES (Gaji)	Rp53,798,579,000	Rp42.664.656.640	79,30%	Rp11.133.922.360
INSPEKTORAT	Rp1,000,000,000	Rp729.252.818	72,93%	Rp270.747.182
D2	Rp36.333.299.000	Rp19.989.994.684	55,02%	Rp16.343.304.316
D1	Rp31.625.133.000	Rp14.319.956.247	45,28%	Rp17.305.176.753
D4	Rp23.994.341.000	Rp10.584.729.357	44,11%	Rp13.409.611.643
D3	Rp7.789.260.000	Rp3.314.524.435	42,55%	Rp4.474.735.565
PUSLAT	Rp3,911,894,000	Rp1.621.842.014	41,46%	Rp2.290.051.986
SES	Rp74,926,923,000	Rp30.716.935.807	41,00%	Rp44.209.987.193
PUSDATIN	Rp11.406.987.000	Rp3.136.458.890	27,50%	Rp8.270.528.110
Total	244.786.416.000	127.078.350.892	51,91%	117.708.065.108

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BHOSDM	Rp5,956,861,000	Rp3.440.452.970	57,76%	Rp2.516.408.030
BHU	Rp65,286,725,000	Rp25.230.217.319	38,65%	Rp40.056.507.681
BPKeu	Rp3,683,337,000	Rp2.046.265.518	55,55%	Rp1.637.071.482
BPKeu (Gaji)	Rp53,798,579,000	Rp42.664.656.640	79,30%	Rp11.133.922.360
D1.1	Rp18,754,375,000	Rp6.972.260.147	37,18%	Rp11.782.114.853
D1.2	Rp2,318,730,000	Rp1.513.245.257	65,26%	Rp805.484.743

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D1.3	Rp10,552,028,000	Rp5.834.450.843	55,29%	Rp4.717.577.157
D2.1	Rp3.231.489.000	Rp1.796.461.563	55,59%	Rp1.435.027.437
D2.2	Rp14,831,835,000	Rp10.300.753.808	69,45%	Rp4.531.081.192
D2.3	Rp18,269,975,000	Rp7.892.779.313	43,20%	Rp10.377.195.687
D3.1	Rp3,969,791,000	Rp1.534.606.432	38,66%	Rp2.435.184.568
D3.3	Rp3,819,469,000	Rp1.779.918.003	46,60%	Rp2.039.550.997
D4.1	Rp3,229,245,000	Rp1.990.225.919	61,63%	Rp1.239.019.081
D4.2	Rp18,663,984,000	Rp7.255.709.907	38,88%	Rp11.408.274.093
D4.3	Rp2,101,112,000	Rp1.338.793.531	63,72%	Rp762.318.469
INSPEKTORAT	Rp1,000,000,000	Rp729.252.818	72,93%	Rp270.747.182
PUSDATIN	Rp11.406.987.000	Rp3.136.458.890	27,50%	Rp8.270.528.110
PUSLAT	Rp3,911,894,000	Rp1.621.842.014	41,46%	Rp2.290.051.986
Total	244.786.416.000	127.078.350.892	51,91%	117.708.065.108

1.2 PELAPORAN EKSTERNAL

1.3.1 Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA merupakan sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.

Pada bulan Agustus 2024 telah dilakukan pengisian dan assesment Rincian Output (RO) pada aplikasi SMART DJA dimana saat ini 70 RO telah dikonfirmasi oleh DJA sebagaimana terdapat pada tampilan berikut:

No.	Program/Regulasi/KR/RO	Volume	Jenis RO	Cara Pelaporan	Pelaporan Capaian	Pelaporan Waktu	Status Konfirmasi	Akai	Tanggal Update	Histori
							KL BJA			
1	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAC Peraturan Pemerintah 111 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan hurufan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (BPP)	Statis	Otomatis	Maksimal	Stabilisasi	✓ ✓	-	2024-01-30 14:15:29	
2	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAB Peraturan Presiden 111 Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan hurufan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (S. Penges)	Statis	Otomatis	Maksimal	Stabilisasi	✓ ✓	-	2024-01-30 14:15:31	
3	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	2,0000 (Rancangan)	Statis	Tahapan	Maksimal	Stabilisasi	✓ ✓	-	2024-01-30 14:15:31	

Gambar 3. 1 Tampilan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada Menu Assessment RO

Sampai dengan saat ini NKA LKPP per Agustus 2024 belum dapat diinformasikan dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.

1.3.2 Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS

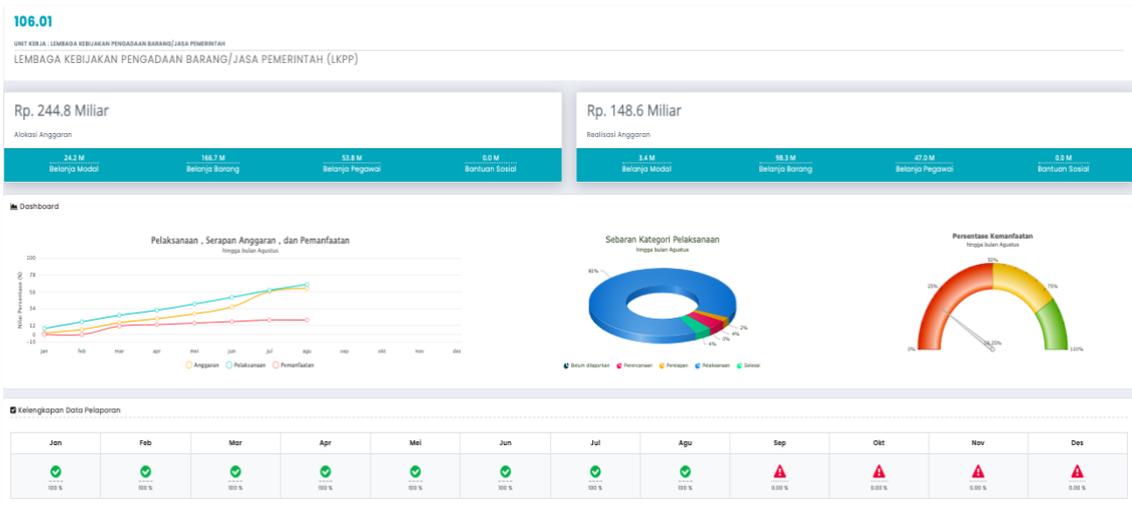
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMonev_2021_v1_19032021.pdf.

Pada awal bulan Agustus 2024 (masa pelaporan periode bulan Agustus 2024), aplikasi e-Monev mengalami proses internalisasi hasil interkoneksi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan proses interkoneksi tersebut terdapat perubahan pada aplikasi e-Monev yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) modul pelaporan yaitu, capaian Komponen, Rincian Output (RO) Satker, dan Rincian Output (RO) Renja, berubah menjadi 2 (dua) modul yaitu pelaporan capaian Komponen dan RO Renja.

Sehubungan dengan proses interkoneksi dengan aplikasi SAKTI tersebut, saat ini pada aplikasi e-monev sudah tidak terdapat menu/modul pelaporan progres dan capaian RO Satker, namun pada tampilan *dashboard monitoring* persentase pelaporan kinerja masih memperhitungkan dan menampilkan persentase kelengkapan pelaporan RO Satker, sehingga menyebabkan persentase progres pelaporan pada

aplikasi e-monev BAPPENAS tidak dapat mencapai 100% walaupun sudah dilakukan pelaporan progres dan capaian pada modul Komponen dan RO Renja.



Gambar 3. 2 Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 Rincian Output, dan 9 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi /Progres
1	8.4 - Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Progres: 67%
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Terdefinisi	Progres: 70%
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	Progres: 66.67%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 66.67%
2.	955-Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 66.67%
3.	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	Progres: 58%
4.	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 68%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Agustus 2024 adalah 64,84%.

3. Komponen

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 65,63%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp57.481.916.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	42.664.656.640	79.3%	11.133.922.360
52 Belanja Barang	3.683.337.000	2.046.265.518	55.55%	1.637.071.482
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	57.481.916.000	44.710.922.158	77.78%	12.770.993.842

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKe di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai IKPA pada bulan Agustus yaitu sebesar 94.96 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Juli yaitu sebesar 94.53 (setelah dilakukan koreksi ulang oleh Kementerian Keuangan).
2. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran BPKe (parsial) sebesar Rp423.718.568 Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp387.909.936 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp35.808.632 atau 9,23%.
3. Pada indikator sasaran kegiatan Indeks maturitas SPIP terdapat permasalahan aplikasi penilaian mandiri SPIP dari BPKP terkadang tidak dapat diakses/eror.
4. Pada Indikator Sasaran Kegiatan Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) mempunyai permasalahan belum muncul sub nilai Capaian Ouput untuk penilaian IKPA bulan Agustus 2024 di laman MONEVPA (<https://spanint.kemenkeu.go.id>). Sehingga nilainya rendah. Penggunaan nilai tersebut hanya untuk sementara.
5. Pada indikator komponen Evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdapat permasalahan yaitu aplikasi e-INTEGRITY SPIP terkadang mengalami gangguan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKe mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP,

Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.

2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
5. Melakukan koordinasi secara intensif kepada BPKP terkait adanya pembaruan informasi dalam pelaksanaan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dengan menggunakan aplikasi.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 indikator sasaran kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.1-Meningkatnya kualitas deregulasi kebijakan	Indeks kualitas kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 70%
		Indeks reformasi hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 75%
2.	8.2-Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 67,55%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
	koordinasi penerapan reformasi birokrasi	Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 75	Progres: 67,75%
3.	8.3-Meningkatnya profesionalitas SDM	Indeks profesionalitas ASN LKPP	Predikat: Sangat Tinggi	Progres: 77,50%
		Indeks sistem merit	Predikat: Sangat Baik	Progres: 73,12%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	957-Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 72,90%
2.	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Layanan	Progres: 67,75%
3.	961-Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Progres: 67,55%
4.	969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 84,21%
5.	954-Layanan Manajemen SDM	510 Orang	362 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Agustus 2024 adalah 72,69%.

3. Komponen

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 69,12%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran BHOSDM TA 2024 adalah sebesar Rp 5.956.861.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.941.861.000	3.440.452.970	57.9 %	2.501.408.030
53 Belanja Modal	15.000.000	-	0%	15.000.000
Total	5.956.861.000	3.440.452.970	57.76 %	2.516.408.030

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran BHOSDM (parsial) sebesar Rp529.334.498. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp409.508.549 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp119.825.949 atau 29,26%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan Indeks kualitas kegiatan dan Indeks reformasi hukum.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 indikator sasaran kegiatan, 8 indikator Rincian Output, dan 18 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.5-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Nilai: B	Progres: 0%
		Indeks pelayanan publik	Predikat: Sangat Baik	Progres: 0%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks: Informatif	Progres: 88,13%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
2.	8.6-Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 70%
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Istimewa	Progres: 67%
		Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I	Predikat: Sangat Baik	Progres: 68%
		Indeks kualitas pengelolaan aset	Nilai: 3,05	Progres: 67%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5 Layanan	Progres: 73,66%
2.	956-Layanan BMN	1 Layanan	Progres: 67%
3.	959-Layanan Protokoler	1 Layanan	Progres: 82,24%
4.	962-Layanan Umum	1 Layanan	Progres: 76,13%
5.	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 73,66%
6.	951-Layanan Sarana Internal	83 Unit	53 Unit
7.	971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	Progres: 0%
8.	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	Progres: 70%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Agustus 2024 adalah 63,34%.

3. Komponen

Tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum memiliki 18 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 70,12%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran BHU TA 2024 adalah sebesar Rp 65.286.725.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	45.875.213.000	24.469.773.189	53.34 %	21.405.439.811
53 Belanja Modal	19.411.512.000	760.444.130	3.92 %	18.651.067.870
Total	65.286.725.000	25.230.217.319	38.65 %	40.056.507.681

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran BHU (parsial) sebesar Rp3.326.957.145. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp6.157.729.305 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp2.830.772.160 atau -45,97%.
2. Masih terdapat dua indikator sasaran kegiatan yang belum memiliki progres yaitu Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan Indeks pelayanan publik dikarenakan akan dilakukan di akhir tahun.
3. Pada RO Layanan BMN – Komponen 053 Penyusunan laporan BMN telah terdapat realisasi 4 laporan, namun belum terdapat realisasi anggaran pada komponen tersebut.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan yang belum memiliki progres yaitu Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan Indeks pelayanan publik.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	4 Rancangan Peraturan	2 Rancangan Peraturan

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	111-Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	Progres: 40,00%
2.	111-Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 R.Perpres	Progres: 90,00%
3.	111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan
4.	111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 47,60%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.1 pada bulan Agustus 2024 adalah 66,90%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.1 memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 50,90%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D1.1 TA 2024 adalah sebesar Rp18.754.375.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.754.375.000	6.972.260.147	37,18%	11.782.114.853
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18.754.375.000	6.972.260.147	37,18%	11.782.114.853

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D1.1 (parsial) sebesar Rp1.074.826.233. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp2.284.314.329 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.209.488.096 atau -52,95%.
2. Terdapat indikator yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu:
 - a. RO Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik; dan
 - b. RO Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada:
 - a. RO Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik; dan
 - b. RO Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Mengakselerasi kegiatan dan pertanggungjawaban guna meningkatkan nilai penyerapan anggaran.

1.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	3 Dokumen	Progres: 71,00%
		Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD Badan Hukum Publik dan Desa	3 Dokumen	2 Dokumen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	125-Pedoman/Model Dokumen KSO BLUD dan Kerjasama BUMD	2 NSPK	Progres: 72,00%
2.	124-Model Dokumen PBJ Khusus	3 NSPK	Progres: 71,00%
3.	123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus	14 Lembaga	6 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.2 pada bulan Agustus 2024 adalah 71,00%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.2 memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 67,89%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu D1.2 TA 2024 adalah sebesar Rp2.318.730.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.318.730.000	1.513.245.257	65,26%	805.484.743

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.318.730.000	1.513.245.257	65,26%	805.484.743

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D1.2 (parsial) sebesar Rp278.798.400. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp153.114.438 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp125.683.962 atau 82,08%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	1.1-Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	397 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha
2.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rekomendasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional	4 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP	2 NSPK	Progres: 50,00%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	4334 UMKM	3737 UMKM
2.	131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan
3.	131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 NSPK	Progres: 41,00%
4.	131-NSPK Pengadaan Barang/Jasa dalam Kerangka Kerjasama Internasional	2 NSPK	Progres: 61,00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.3 pada bulan Agustus 2024 adalah 60,25%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.3 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 54,00%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu D1.3 TA 2024 adalah sebesar Rp10.552.028.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	10.552.028.000	5.834.450.843	55,29%	4.717.577.157
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	10.552.028.000	5.834.450.843	55,29%	4.717.577.157

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D1.3 (parsial) sebesar Rp906.218.424. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.305.075.648 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp398.857.224 atau -30,56%.
2. Terdapat indikator yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu:
 - a. Indikator sasaran kegiatan jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJ; dan
 - b. RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada:
 - a. Indikator sasaran kegiatan jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJ; dan
 - b. RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem informasi lainnya	2 Segmen	Progres: 73 Persen
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya	3 Segmen	Progres: 62 Persen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan	624 K/L/Pemda	564 K/L/Pemda
2.	5.2-Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	80 Persen	Progres: 11 Persen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 73 Persen
2.	212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 62 Persen
3.	211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	2 Laporan	Progres: 48 Persen

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.1 pada bulan Agustus 2024 adalah 61%.

3. Komponen

Tahun 2024, D2.1 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 61.78%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D2.1 TA 2024 adalah sebesar Rp3,231,489,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3,073,689,000	1,796,461,563	58.45%	1,277,227,437
53 Belanja Modal	157,800,000	-	0%	157,800,000
Total	3,231,489,000	1,796,461,563	55.59%	1,435,027,437

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pertemuan antara Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan, Pusat Data dan Informasi, dan Biro Perencanaan Keuangan yang membahas mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja atas Rincian Output (RO) Roadmap IT LKPP 2025-2029 dan dengan mempertimbangkan kendali pelaksanaan kegiatan dan anggaran, disepakati bahwa mulai periode monitoring dan evaluasi Agustus 2024, progres dan capaian RO Roadmap IT LKPP 2025-2029 akan diperhitungkan ke dalam capaian kinerja PUSDATIN.
2. Pada bulan Agustus 2024, realisasi penyerapan anggaran D2.1 (parsial) adalah sebesar Rp294,806,178. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp976,196,542 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-) Rp681,390,364 atau minus (-) 69.80%.
3. Terdapat kendala pada Sasaran Kinerja Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik, Indikator Jumlah K/L/Pemda Yang Memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan terdapat kendala bahwa 1 lembaga yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang input RUP sebagai Satker Kemendagri dan 1 Pemda yakni Kabupaten Waropen yang belum mengumumkan RUP pada SIRUP.
4. Terdapat indikator kinerja yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu:
 - a. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ, Indikator Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan
 - b. RO Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP.
5. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
 - a. Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi.

- b. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan
 - b. RO Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Terhadap kendala yang dialami pada Sasaran Kinerja Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik indikator Indikator Jumlah K/L/Pemda Yang Memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dapat disampaikan rekomendasi, terhadap K/L dan Pemda yang terkendala dalam mengumumkan RUP pada SIRUP untuk menghimbau dan melakukan pendampingan bagi K/L dan Pemda untuk dapat menayangkan RUP pada aplikasi SIRUP.
6. Mendorong kegiatan sosialisasi kepada seluruh K/L/Pemda untuk dapat disiplin dan melakukan pendampingan dalam melakukan input rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP.
7. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

1.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 5 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 5 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	450 LPSE	396 LPSE
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya	3 Segmen	Progres: 26%
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing	450 K/L/Pemda	19 K/L/Pemda
2.	5.3-Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal	Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE	273 LPSE	262 LPSE
		Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital	100 Persen	Progres: 67%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	231-SPSE Terpusat	450 Layanan	396 Layanan
2.	234-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola	273 Unit Kerja	262 Unit Kerja

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.2 pada bulan Agustus 2024 adalah 65,83%.

3. Komponen

Tahun 2024, D2.2 memiliki 8 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 58,13%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D2.2 TA 2024 adalah sebesar Rp14,831,835,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	14.831.835.000	10.300.753.808	69.45%	4.531.081.192
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	14.831.835.000	10.300.753.808	69.45%	4.531.081.192

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.2 di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D2.2 (parsial) sebesar Rp1.670.125.007. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.193.501.912 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp476.623.095 atau 39,93%.
2. Pada indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya" terdapat kendala sebagai berikut:
 - 1) Kendala koordinasi dalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang mendukung tercapainya Renstra.
 - 2) Kendala Teknis: Terdapat kendala/gangguan pada PDN.
 - 3) Kendala Non Teknis: Aspek Legalitas (Reviu) dan Aspek Administrasi (Sertifikasi ISO, dan lainnya).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya, agar meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan melaporkan kepada pimpinan.
 5. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

1.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	2.1-Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah	Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik	10.000.000 PDN	8.414.378 PDN
		Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik	4.500.000 Produk UMK-K	7.830.554 Produk UMK-K
2.	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya	1 Segmen	4 Segmen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing	450 K/L/Pemda	630 K/L/Pemda

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	221-Pedoman Sistem Katalog dan E-Purchasing	2 Pedoman	1 Pedoman
2.	221-Produk yang Masuk E-Catalogue	10.000.000 Produk	8.414.378 Produk
3.	221-Sistem E-Purchasing Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 68%
4.	221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik	1 Laporan	Progres: 66.60%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.3 pada bulan Agustus 2024 adalah 62.92%.

3. Komponen

Tahun 2024 D2.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 63.9%.

A. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D2.3 TA 2024 adalah sebesar Rp18,269,975,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18,173,975,000	7,892,779,313	43.43%	10,281,195,687
53 Belanja Modal	96,000,000	-	0%	96,000,000
Total	18,269,975,000	7,892,779,313	43.20%	10,377,195,687

B. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024 realisasi penyerapan anggaran D2.3 (parsial) adalah sebesar Rp853,903,161, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp970,888,707 sehingga memiliki deviasi minus (-) Rp116,985,546 atau minus (-) 12.05%.
2. Masih terdapat kendala yang sama seperti pada bulan-bulan sebelumnya, antara lain:

- a. Pada Sasaran Kegiatan "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik", pada Indikator "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya" yang status saat ini masih menunggu MoU/PKS dengan kemenESDM terkait integrasi dengan SHE, dan Kementerian Agama terkait integrasi data Sertifikat Halal.
 - b. Pada RO "Sistem E-Purchasing Terintegrasi", terdapat kendala bahwa perlu menunggu MoU/PKS dengan KemenESDM terkait integrasi data SHE, MoU/PKS dengan Kementerian Agama terkait integrasi data sertifikat halal serta penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD (BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/BUMDesma).
3. Terdapat kinerja yang realisasinya sampai dengan bulan Agustus 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, antara lain:
- a. SK "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah", indikator Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik yang telah terealisasi 7.830.554 produk UMK-K, dari target sebesar 4.500.000 produk UMK-K,
 - b. SK "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik" pada indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya telah terealisasi sebanyak 4 Segmen, dari target sebanyak 1 Segmen,
 - 2) Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing telah terealisasi sebanyak 630 K/L/Pemda, dari target sebanyak 450 K/L/Pemda
4. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
- a. Produk yang Masuk *e-Catalogue*; dan
 - b. Sistem *e-Purchasing* Terintegrasi

C. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Terhadap Indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Eprocuring dengan sistem lainnya", unit organisasi diharapkan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengakselerasi penyelesaian MoU/Perjanjian Kerja Sama.
5. Terhadap RO Sistem e-Purchasing Terintegrasi, agar senantiasa berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka akselerasi penyusunan MoU/Perjanjian Kerja Sama yang dibutuhkan untuk pelaksanaan integrasi sistem serta koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait dengan penyusunan aturan terbaru mengenai penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD.
6. Terkait dengan 3 indikator Sasaran Kinerja yang realisasinya telah melebihi target, agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan Agustus 2024. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.
7. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

1.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	7.600 Orang	9.137 Orang
		Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK	7.975 Orang	13.341 Orang
2.	6.2-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	Persentase pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ	70 Persen	Progres: 80%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 87%
2.	311-SDM JF PPBJ	7.600 Orang	9.137 Orang
3.	311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	382 Lembaga	409 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.1 pada bulan Agustus 2024 adalah 84%.

3. Komponen

Tahun 2024, D3.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 74,89%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D3.1 TA 2024 adalah sebesar Rp3,969,791,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3,969,791,000	Rp1.534.606.432	38.66%	Rp2.435.184.568
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	Rp3,969,791,00	Rp1.534.606.432	38.66%	Rp2.435.184.568

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D3.1 (parsial) sebesar Rp176.838.550. Realisasi ini lebih kecil dari RPD sebesar Rp234.714.892 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp57.876.342 atau -24,66%.
2. Masih terdapat permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: finalisasi peraturan induk masih dalam proses dan belum selesai.
3. Terdapat 2 indikator Sasaran Kinerja yaitu Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda dan Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK serta 1 Rincian Output pada SDM JF PPBJ yang realisasinya telah melebihi target.
4. Terdapat 1 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu;
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Terkait permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar proses penyusunan tetap dilaksanakan secara paralel sembari menunggu finalisasi peraturan induk.
4. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

1.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi	5.480 Orang	5.470 Orang
		Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi	92%	94%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	34 Lembaga	19 Lembaga
2.	331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75 Orang	Progres: 72%
3.	331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5.480 Orang	5.470 Orang
4.	331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	Progres: 70%
5.	332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20 NSPK	15 NSPK
6.	331-Sarana Sertifikasi PBJP	196 Unit	128 Unit

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.3 pada bulan Agustus 2024 adalah 73%.

3. Komponen

Tahun 2024 D3.3 memiliki 18 Komponen dari 6 Rincian Output dan rata-rata progres komponen pada bulan Agustus 2024 adalah 66,94%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D3.3 TA 2024 adalah sebesar Rp3.819.469.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.819.469.000	1.779.918.003	46.6%	2.039.550.997
53 Belanja Modal	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
Total	3.819.469.000	1.779.918.003	46.6%	2.039.550.997

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D3.3 (parsial) sebesar Rp 240.060.910. Realisasi ini lebih kecil dari RPD sebesar Rp 377.858.390 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp137.797.480 atau -36.47%.
2. Terdapat permasalahan pada Rincian Output Sarana Sertifikasi PBJP yaitu:
 - a) Kendala Penyimpanan atau Disk pada Server 70 penuh sehingga dilakukan pemindahan data ke Server 73.
 - b) Kendala Penyimpanan atau Disk local untuk database pemilik sertifikat dan riwayat ujian penuh, sehingga dilakukan pemindahan data-data arsip ke beberapa media (flashdisk dan google drive pribadi).
 - c) Kendala pada Jaringan LKPPID maupun LKPP Guest yang tidak stabil.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a) Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c) Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Pada RO Sarana Sertifikasi PBJP yaitu:

- a) Agar dapat membackup data penyimpanan ke cloud LKPP atau melakukan pengadaan Harddisk Eksternal untuk media penyimpanan.
- b) Melakukan koordinasi dengan Pusdatin sebagai pengelola Jaringan LKPPID maupun LKPP Guest untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Kendala pada Jaringan Internet.

1.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.1- Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	68 K/L	26 K/L
		Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	60 K/L	26 K/L
2.	7.1-Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di K/L	Jumlah K/L yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	50 K/L	47 K/L
		Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	16 K/L	11 K/L

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	68 K/L	38 K/L
2.	412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20 K/L	14 K/L
3.	413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probitry Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi	16 K/L	14 K/L

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.1 pada bulan Agustus 2024 adalah 66,66%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen sebesar 66,66%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D4.1 TA 2024 adalah sebesar Rp 3.229.245.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.229.245.000	1.990.225.919	61.63%	1.239.019.081
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.229.245.000	1.990.225.919	61.63%	1.239.019.081

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D4.1 (parsial) sebesar Rp406.336.593. Realisasi ini lebih tinggi dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp8.810.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp397.526.593 atau 4.512,22%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran tetap dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
- c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.2-Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	530 Pemda	536 Pemda
		Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	538 Pemda	537 Pemda
2.	7.2-Meningkatnya <i>clearing house</i> , konsolidasi, dan <i>probity advice</i> di Pemda	Jumlah Pemda yang menyelenggarakan <i>clearing house</i> yang efektif	100 Pemda	93 Pemda
		Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>	50 Pemda	26 Pemda

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	538 Pemda	411 Pemda
2.	422- Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	100 Pemda	93 Pemda
3.	423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probity Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	50 Pemda	26 Pemda

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D4.2 pada bulan Agustus 2024 64,46%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.2 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 52,05%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D4.2 TA 2024 adalah sebesar Rp 18.663.984.000,. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.663.984.000	7.255.709.907	38.88%	11.408.274.093
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18.663.984.000	7.255.709.907	38.88%	11.408.274.093

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D4.2 (parsial) sebesar Rp2.133.851.380. Realisasi ini lebih tinggi dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.420.181.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp713.670.380 atau sebesar 50,25%.
2. Pada Rincian Output 6322.FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan, komponen 052 dan 053, telah terdapat realisasi dan capaian kinerja, tetapi belum terdapat realisasi anggaran pada komponen tersebut.
3. Terdapat permasalahan yang sama pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN”, indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K” bahwa Hingga bulan Agustus 2024, jumlah Pemda yang membelanjakan anggarannya untuk PDN minimal 80% sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Tetapi nilai ini belum final, karena pembagiannya merupakan nilai transaksi yang terus bergerak dan baru akan selesai di akhir tahun. Belanja PDN akan memasuki finalisasi pada TW IV.
4. Terdapat Permasalahan pada indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan *Clearing House*”, antara lain adalah:

- a. Belum semua Pemda terinformasikan terkait dengan adanya forum Clearing House, baik tata cara pembentukan, anggota yang terlibat, serta honorarium yang didapat.
 - b. Belum ada regulasi yang mewajibkan pembentukan *clearing house*, sehingga perlu upaya yang lebih besar untuk meyakinkan Pemda dalam membentuk forum *clearing house*.
 - c. Pemda masih belum terdorong untuk membentuk Clearing House karena beberapa faktor, seperti anggaran, kompetensi SDM, dan merasa bahwa penyelesaian permasalahan pengadaan harus melalui LKPP.
5. Terdapat permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *Probitly Advice*” dan indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan *Probitly Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi” yaitu:
- a. Belum ada pemetaan mendalam terhadap komoditas potensial antar OPD yang dapat dikonsolidasikan.
 - b. Adanya kendala intervensi non-teknis dalam pelaksanaan konsolidasi Pemda, terutama jika melihat potensi lingkup konsolidasi yang luas (tingkat kota/kabupaten atau provinsi).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *probitly advice*” dan Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan *Probitly Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi”.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$) serta memperhatikan realisasi anggaran agar sesuai dengan komponen pelaksanaannya.
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan

- c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN”, “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K” dapat dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan pemetaan serta monitoring secara berkala kepada Pemerintah Daerah yang belum menerapkan belanja PDN dan UMK sesuai dengan kriteria minimalnya.
 - b. Mendorong pencatatan belanja pengadaan secara berkala kepada Pemerintah Daerah terutama untuk belanja pengadaan PDN dan UMK melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis lainnya.
 - c. Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas produk PDN dan UMK kepada pemangku kepentingan seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM, dan berkoordinasi dengan direktorat terkait di LKPP.
6. Terhadap Indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ”, agar dapat menyusun jadwal sosialisasi serta melaksanakan kegiatan sosialisasi berdasarkan jadwal dan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang belum menerapkan belanja PDN dan UMK sesuai dengan kriteria minimal.
7. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* kepada Pemerintah Daerah, seperti pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis, yang di dalamnya melibatkan Pemerintah Daerah yang telah berhasil terkait:
 - a. Penyelenggaraan *Clearing House* yang efektif;
 - b. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan; dan
 - c. Layanan *probity advice* oleh LKPP beserta persyaratan yang harus dipenuhi.

1.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 14 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	7.3-Meningkatnya dukungan penegakan	Persentase perkara/permasalahan PBJP yang terlayani	100 Persen	Progres: 64%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
	hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS	50 /K/L/Pemda	50 K/L/Pemda
		Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya	65 APIP K/L/Pemda	61 APIP K/L/Pemda
		Jumlah Provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli yang optimal	15 Provinsi	11 Provinsi

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2 Orang	Progres: 95%
2.	432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	50 Orang	24 Orang
3.	431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	360 Perkara	322 Perkara
4.	432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25 Perkara	14 Perkara
5.	431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9 Lembaga	7 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.3 pada bulan Agustus 2024 adalah 80,20%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.3 memiliki 14 Komponen dari 5 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 80,14%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran D4.3 TA 2024 adalah sebesar Rp 2.101.112.000,-. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.101.112.000	1.338.793.531	63.72%	762.318.469
53 Belanja Modal	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
Total	2.101.112.000	1.338.793.531	63.72%	762.318.469

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran D4.3 (parsial) sebesar Rp379.325.100. Realisasi ini lebih tinggi dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp169.270.250,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp210.054.850 atau sebesar 124,09%

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Inspektorat memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	8.8-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	Progres: 75%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	85 Persen	Progres: 41.67%
		Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal	Predikat: Sangat Memuaskan	Progres: 65%
		Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Predikat: Sangat Baik	Progres: 55%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	965-Layanan Audit Internal	12 Dokumen	Progres: 70%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Agustus 2024 adalah 70%.

3. Komponen

Tahun 2024. Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 69%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran Inspektorat TA 2024 adalah sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.000.000.000	729.252.818	72.93%	270.747.182
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.000.000.000	729.252.818	72.93%	270.747.182

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran Inspektorat (parsial) sebesar Rp 117.730.179. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 130.563.413. sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp12.833.234 atau -9.83%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 19 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih	19.600 Orang	17.572 Orang
		Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih	4.250 Orang	4.178 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
		Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi	12.000 Orang	11.552 Orang
		Persentase peningkatan kualitas pelatihan	85 Persen	83.20 Persen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	511-LPPBJ yang Terakreditasi	80 Lembaga	80 Lembaga
2.	511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	7 NSPK	Progres: 65%
3.	512-Pedoman Pelatihan PBJ	3 Pedoman	1 Pedoman
4.	511-Media Pembelajaran Berbasis TIK	5 Paket	Progres: 70%
5.	511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis	22.950 Orang	20.757 Orang
6.	512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional	1.400 Orang	1141 Orang
7.	512-Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJP	2 Laporan	Progres: 1 Laporan

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Puslat SDM PBJ pada bulan Agustus 2024 adalah 70,24%.

3. Komponen

Tahun 2024, Puslat SDM PBJ memiliki 19 Komponen dari 7 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 66,07%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran Puslat SDM PBJ TA 2024 adalah sebesar Rp3.911.894.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.444.686.000	1.453.699.214	42.2%	1.990.986.786
53 Belanja Modal	467.208.000	168.142.800	35.99%	299.065.200
Total	3.911.894.000	1.621.842.014	41.46%	2.290.051.986

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Puslat SDM PBJ di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2024 realisasi penyerapan anggaran Puslat SDM PBJ (parsial) adalah sebesar Rp107.865.034. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp416.912.100 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp309.047.066 atau -74,13%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

1.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.7-Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	Predikat SPBE	Predikat: Baik	Progres: 67%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Progres: 67%
2.	963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 Layanan	Progres: 67%
3.	963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 Unit	Progres: 67%
4.	963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Sistem Informasi	Progres: 67%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusdatin pada bulan Agustus 2024 adalah 67%.

3. Komponen

Tahun 2024, Pusdatin memiliki 9 Komponen dari 4 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 67%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-14, pagu anggaran Pusdatin TA 2024 adalah sebesar Rp11.406.987.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Agustus 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.305.047.000	2.756.298.729	37.73%	4.548.748.271
53 Belanja Modal	4.101.940.000	380.160.161	9.27%	3.721.779.839
Total	11.406.987.000	3.136.458.890	27.5%	8.270.528.110

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pertemuan antara Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan, Pusat Data dan Informasi, dan Biro Perencanaan Keuangan yang membahas mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja atas Rincian Output (RO) Roadmap IT LKPP 2025-2029 dan dengan mempertimbangkan kendali pelaksanaan kegiatan dan anggaran, disepakati bahwa mulai periode monitoring dan evaluasi Agustus 2024, progres dan capaian RO Roadmap IT LKPP 2025-2029 akan diperhitungkan ke dalam capaian kinerja PUSDATIN.
2. Pada bulan Agustus 2024 realisasi penyerapan anggaran Pusdatin (parsial) adalah sebesar Rp841.390.313. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar jika

dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp751.265.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp90.125.313 atau 12,00%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

BAB III KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Agustus 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan Agustus 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp 127.078.350.892 (51,91%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	42.664.656.640	79,30%	11.133.922.360
52 Belanja Barang	167.782.128.000	83.104.947.161	49,84%	83.633.429.839
53 Belanja Modal	23.205.709.000	1.308.747.091	5,40%	22.940.712.909
TOTAL	244.786.416.000	127.078.350.892	51,91%	117.708.065.108

2. Pada bulan Agustus 2024, realisasi anggaran LKPP (parsial) sebesar Rp18.379.345.673. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp21.977.168.320, sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp3.597.822.647 atau -16,37%.
3. Untuk bulan Agustus 2024, belum terdapat Unit organisasi yang memiliki deviasi RPD masih dalam ambang batas ($\pm 5\%$) karena seluruh unit organisasi memiliki deviasi RPD di luar ambang batas ($\pm 5\%$).
4. Nilai IKPA LKPP bulan Agustus 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 94,96 yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Juli 2024 sebesar 94,45.
5. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target, yaitu:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
 - b. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya
 - c. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan *E-purchasing*
 - d. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
 - e. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
 - f. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
 - g. Indikator Sasaran Kegiatan - Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS

- h. Indikator Rincian Output - SDM JF PPBJ
 - i. Indikator Rincian Output - UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3
6. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Merencanakan dan mengupayakan percepatan kegiatan serta proses pertanggungjawaban anggaran agar target penyerapan anggaran pada akhir triwulan III sebesar $\geq 71,2\%$ dapat tercapai;
 - c. Meningkatkan pencapaian kinerja fisik pada indikator yang masih perlu ditingkatkan dan masih belum berprogres;
 - d. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen);
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Agustus 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.

